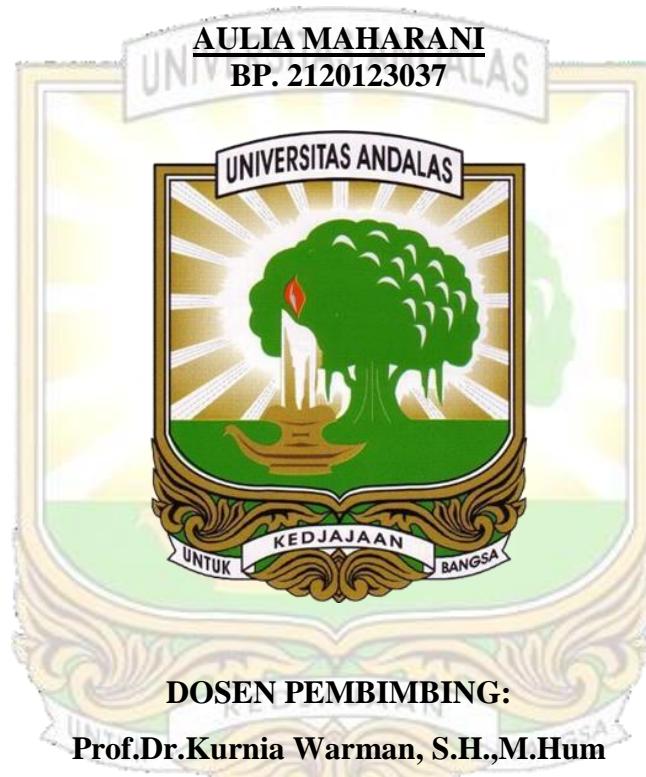


TESIS
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH DI ATAS TANAH
PERKERETAAPIAN DI NAGARI KOTO TANGAH SIMALANGGANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

*Diajakun Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*

OLEH:

AULIA MAHARANI
BP. 2120123037



DOSEN PEMBIMBING:
Prof.Dr.Kurnia Warman, S.H.,M.Hum
Dr.Syofiarti, S.H.,M.H

MAGISTER KENOTARIATAN
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH DI ATAS TANAH
PERKERETAAPIAN DI NAGARI KOTO TANGAH SIMALANGGANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Aulia Maharani, 2120123037, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Andalas, Tahun 2024

ABSTRAK

Keberadaan tanah perkeretaapian zaman Hindia Belanda yang tidak dipergunakan lagi sebagaimana mestinya banyak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak lagi digunakan membuat masyarakat banyak mendirikan bangunan di atasnya salah satu di Nagari Koto Tangah Simalanggang. Pendirian bangunan ini juga tanpa sebab, karena berdasarkan sejarahnya *non-aktif* moda transportasi ini yang dikenal dengan segmen Payakumbuh-Limbanang sudah sejak tahun 1933 dengan kata lain *non-aktif* jauh sebelum dilakukannya nasionalisasi oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia. Apabila ditarik kebelakang sejarahnya tanah perkeretaapian zaman Hindia Belanda di nagari ini merupakan tanah ulayat nagari dan tanah ulayat kaum dari masyarakat. Klaim tanah perkeretaapian oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai induk perusahaan yang menaungi moda transportasi kereta api jelas menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat di Nagari Koto Tangah Simalanggang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Status hak atas tanah perkeretaapian di Nagari Koto Tangah Simalanggang. 2) Jaminan kepastian hukum dalam penguasaan tanah perkeretaapian di Nagari Koto Tangah Simalanggang. Hasil penelitian diketahui bahwa tanah perkeretaapian yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk penunjang operasional kereta tentu menjadi tanah negara karena tidak dipergunakan lagi sesuai dengan peruntukannya selain itu *grondkaart* yang dijadikan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bukanlah merupakan hak atas tanah. Status tanah perkeretaapian di Nagari Koto Tangah Simalanggang karena berstatus lintas *non-aktif* tentu hendaknya kembali menjadi tanah negara disamping itu PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak bisa melakukan pemungutan sewa sebab menyalahi aturan yang berlaku. Kedua, bahwa agar terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat Nagari Koto Tangah Simalanggang hendaknya ada regulasi yang lebih jelas dalam pengaturan penguasaan tanah perkeretaapian hal ini dilakukan agar mencegah timbulnya sengketa dikemudian hari.

Kata kunci : Kepastian hukum, Tanah Perkeretaapian, Hak atas tanah

LEGAL SECURITY REGARDING LAND RIGHTS ON RAILWAY LAND IN NAGARI KOTO TANGAH SIMALANGGANG FIFTY CITY DISTRICT

Aulia Maharani, 2120123037, Master of Notary, Faculty of Law

Andalas University, 2024

ABSTRACT

The existence of the Dutch East Indies era railway land which is no longer used properly has caused a lot of polemics in the community. This is because it is no longer used, causing many people to build buildings on it, one of which is in Nagari Koto Tangah Simalanggang. The construction of this building is also without reason, because historically this mode of transportation, known as the Payakumbuh-Limbanang segment, has been inactive since 1933, in other words, it has been inactive long before nationalization was carried out by the Government of the Republic of Indonesia. If you look back at the history of the Dutch East Indies era railway land in Nagari, this was the ulayat land of the Nagari and the ulayat land of the people of the community. Railway land claim by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) as the holding company that oversees the rail transportation mode clearly causes a lack of legal certainty and legal protection for the community in Nagari Koto Tangah Simalanggang. The formulation of the problem in this research is: 1) Status of railway land rights in Nagari Koto Tangah Simalanggang. 2) Guarantee of legal certainty in the control of railway land in Nagari Koto Tangah Simalanggang. The results of the study showed that railway land that is no longer used to support train operations certainly becomes state land because it is no longer used according to its designation, besides that the grondkaart used by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) is not a land right. The status of railway land in Nagari Koto Tangah Simalanggang because it has a non-active crossing status should certainly return to state land besides that PT. Kereta Api Indonesia (Persero) cannot collect rent because it violates applicable regulations. Second, in order to create legal certainty for the people of Nagari Koto Tangah Simalanggang, there should be clearer regulations in regulating the control of railway land. This is done to prevent disputes from arising in the future.

Keywords: Legal certainty, Railway Land, Land rights